

LAMPIRAN XIV:
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA
KOTA CIMAHI TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu unsur penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kota Cimahi sebagai salah satu kota industri dan jasa di Provinsi Jawa Barat menghadapi berbagai tantangan dalam sektor ketenagakerjaan, di antaranya masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Adanya ketidaksesuaian antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Sebagai bagian dari perencanaan tahunan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2026 disusun untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025–2029 dan mendukung proses pencapaian tujuan dari Visi dan Misi akan selaras dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi sampai tahun 2029 sesuai prioritas daerah, serta responsif terhadap isu-isu strategis ketenagakerjaan.

Kota Cimahi juga menghadapi tantangan global berupa perubahan teknologi, perkembangan ekonomi digital, serta transformasi pasar kerja yang semakin dinamis. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif, partisipatif, dan inklusif. Pelatihan berbasis kompetensi, penyediaan informasi pasar kerja, peningkatan kualitas layanan penempatan tenaga kerja, dan penguatan hubungan industrial menjadi pilar utama dalam mendukung terwujudnya tenaga kerja yang produktif, kompeten, dan berdaya saing.

Dengan tersusunnya Renja ini, Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong terciptanya kondisi ketenagakerjaan yang kondusif dan berkeadilan di Kota Cimahi.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4356);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Jaminan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
20. Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja & Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 seri D);
27. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 seri D);
28. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Cimahi;
30. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 196);
31. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
32. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 157 seri A);
33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;

34. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang sistematis, terarah, dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja selama tahun anggaran 2026. Renja ini disusun sebagai penjabaran operasional dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025–2029.

Tujuan dari penyusunan Renja ini adalah:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi ke dalam program dan kegiatan tahun 2026 sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi;
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program dan kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2026;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum sebagai bahan pijakan penyusunan kebijakan serta maksud dan tujuan dalam penyusunan Renja PD.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal PD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

BAB V PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pembangunan untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni penyusunan, penetapan, pengendalian pelaksanaan dan evaluasi rencana yang dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana, meliputi :

- 1) penyiapan rancangan rencana pembangunan di bidang Tenaga Kerja dan Trasmigrasi yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur
- 2) masing-masing bidang menyiapkan rancangan Rencana Kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan
- 3) melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana kerja yang dihasilkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan
- 4) penyusunan rancangan akhir rencana kerja.

b. Penetapan Rencana

Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya

c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengendalian pelaksanaan rencana kerja dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan menyesuaikan selama pelaksanaan rencana oleh pimpinan dinas.

d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Bagian dari kegiatan perencanaan rencana kerja yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan, berdasarkan

indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan, yaitu : masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Evaluasi rencana kerja merupakan dasar untuk perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya. Evaluasi pelaksanaan Renja 2026 dilakukan terhadap semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2024, secara umum capaian target renja SKPD dan Renstra tahun lalu pada Dinas Tenaga Kerja seluruhnya telah mencapai target, namun masih ada beberapa kegiatan yang masih bisa lebih ditingkatkan kembali.

2.1.1. Evaluasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 s.d. Triwulan II

- Indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki standar kompetensi ditargetkan 90% dan tercapai sebesar 100 % dengan tingkat capaian indikator 111 %;
Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi selama Tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan yang menunjang peningkatan kompetensi pencari kerja dengan total Peserta Pelatihan sebanyak 1129 Orang
 - o Melalui APBD sebanyak 870 Orang
 - Menjahit Busana Industri 1 : 100 Orang
 - Kuliner : 110 Orang
 - Tata Rias Pengantin 1 : 30 Orang
 - Make Up Artist : 40 Orang
 - Kuliner Disabilitas : 50 Orang
 - Kuliner P2wkss : 28 Orang

• Barista 1	:	40 Orang
• Bahasa Jepang	:	15 Orang
• Menjahit Busana Industri 2	:	100 Orang
• In House Training Catering	:	80 Orang
• It Digital	:	60 Orang
• Broadcasting	:	20 Orang
• Bahasa Jerman	:	20 Orang
• In House Kuliner	:	62 Orang
• Menjahit Dasar - Mahir	:	20 Orang
• Barista 2	:	30 Orang
• Hantaran	:	30 Orang
• Tata Rias Pengantin 2	:	15 Orang
• Mekatronika	:	20 Orang
Total	:	870 Orang

o Melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
sebanyak 259 Orang

• Manajemen Retail	:	100 Orang
• Jasa Konstruksi	:	50 Orang
• Security	:	109 Orang
Total	:	259 Orang

Capaian indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi



Kompetensi Pencari Kerja di Kota Cimahi menunjukkan tren yang sangat positif. Capaian Persentase Pencari Kerja yang memiliki standar kompetensi pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 111,11% dari target sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 100%. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas program pelatihan kerja dan sertifikasi yang diterapkan di Kota Cimahi. Ke depan, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa kompetensi ini tetap relevan dengan kebutuhan industri, serta menjembatani lulusan pelatihan dengan peluang kerja yang sesuai.

Program Yang Mendukung

Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja di Kota Cimahi didukung Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas para pekerja. Program ini biasanya meliputi pelatihan keterampilan teknis dan non-teknis yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi kerja

dan mempersiapkan tenaga kerja untuk menghadapi tantangan pasar kerja yang terus berubah. Dalam teknis pelaksanaannya Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi membangun komunikasi dengan LPK, BBVP Lembang, BBPVP Bandung dan perusahaan untuk menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Selain itu Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga bekerjasama dengan Bidang Hubungan Industrial dalam upaya untuk pemberdayaan pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja untuk dilatih agar bisa bekerja kembali atau menjadi tenaga kerja mandiri.

2.1.2 Indikator Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan

Kesempatan Kerja di Kota Cimahi menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keadaan Kesempatan Kerja di Kota Cimahi hampir kembali ke tingkat sebelum pandemi. Adapun capaian Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Kota Cimahi pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 110,80% dari target sebesar 79% dan terealisasi sebesar 87,53%.

Program Yang Mendukung

Meningkatnya Kesempatan Kerja di Kota Cimahi didukung oleh 2 program yaitu Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

1. Program Penempatan Tenaga Kerja.

Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja melayani dan mengatur kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ingin bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Wujud pelayanannya melalui pelayanan administrasi hingga kerjasama dengan rekanan pemilik pekerjaan ataupun perusahaan pencari kerja dalam penyaluran tenaga kerja.

Pelayanan Kepada Pencari Kerja dilakukan secara Manual atau Daring (*Online System*). Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja harus terintegrasi dalam satu sistem Penempatan Tenaga Kerja Nasional melalui aplikasi <https://siapkerja.kemnaker.go.id/>. Pencari kerja yang akan bekerja didalam atau ke luar negeri wajib dilayani oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Dalam penempatan Tenaga kerja di Kota Cimahi, pemerintah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan perekrut tenaga kerja ataupun dengan pemberi kerja. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi juga bekerjasama dan berkoordinasi dengan BBVP Lembang, BBPVP Bandung dan LPK untuk melatih pencari kerja agar mempunyai kompetensi yang mumpuni dan sekaligus menempatkannya.

Dinas Tenaga Kerja juga membangun komunikasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) terkait upaya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Pekerja Migran Indonesia) yang bekerja keluar negeri. Selain itu juga bekerjasama dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) terkait dengan penempatan Pekerja Migran Inndonesia.

2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Pada tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dan berhasil mendapatkan kuota untuk pemberangkatan transmigran asal Kota Cimahi ke Kabupaten Simeuleu di Nangroe Aceh Darussalam. Namun calon transmigran yang semula mendaftar, mengundurkan diri dengan alasan bahwa daerah tujuan transmigrasi yang merupakan daerah pesisir tidak sesuai dengan karakteristik mereka yang berprofesi sebagai Patani, sehingga pada tahun 2024 tidak ada pemberangkatan.

Capaian indikator Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan



Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan ;

Indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan ditargetkan 79 % dan tercapai 87,53 % dengan tingkat capaian indikator 110,80 %.

Untuk Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi telah berhasil menempatkan sebanyak 2,787 orang pencari kerja, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 1,835 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) BKK : 468 Orang
- 2) LPK : 558 Orang
- 3) Sidakep Tri : 909 Orang
- 4) CPMI : 58 Orang
- 5) Pelatihan : 618 Orang
- 6) Job Fair : 176 Orang

2.1.3 Indikator Persentase Perselisihan Buruh dan Pengusaha yang Diselesaikan

Indikator Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan ditargetkan 90 % dan tercapai 100 % dengan tingkat capaian indikator 111 %.

Upaya pencapaian kondusifitas ketenagakerjaan, Disnaker telah melakukan verifikasi ulang data Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak. Dari hasil verifikasi tersebut, Perusahaan yang harus memiliki kriteria Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak adalah 573 Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Memiliki Peraturan Perusahaan sebanyak 208 perusahaan
2. Memiliki Perjanjian Kerja Bersama sebanyak 76 perusahaan
3. Memiliki Struktur Skala Upah sebanyak 284 perusahaan
4. Memiliki LKS Bipartit sebanyak 53 perusahaan
5. Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 573 perusahaan

Dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ditandai dengan semakin stabilnya kondisi perekonomian secara makro, kemudian pelaksanaan Pembinaan yang dilakukan secara efektif, intensif dan berkesinambungan, konsolidasi dengan serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha di Kota Cimahi serta Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, sangat berpengaruh terhadap kondusifitas industri di Kota Cimahi. Hal ini dibuktikan dengan penurunan jumlah Perselisihan yang terjadi di tahun 2024.

Pada Tahun 2024, Perselisihan di Kota Cimahi menurun dari semula 31 Kasus di tahun 2023 menjadi 23 kasus di 2024 namun Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial meningkat dari semula ditargetkan 2 kasus melonjak menjadi 15 perkara yang bisa diselesaikan tanpa harus menjadi kasus.

Capaian indikator Persentase Perselisihan Buruh dan Pengusaha yang Diselesaikan



Meningkatnya kesejahteraan buruh dan keharmonisan hubungan industrial di Kota Cimahi mencerminkan kondisi yang semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan buruh dan hubungan industrial yang harmonis dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, capaian persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan di Kota Cimahi pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 111,11% dari target 90%, yang berarti seluruh perselisihan berhasil diselesaikan dengan realisasi 100%."

PROGRAM YANG MENDUKUNG

Meningkatnya kesejahteraan buruh dan keharmonisan hubungan industrial di Kota Cimahi didukung Hubungan Industrial. Dalam teknis Pelaksanaan Program Hubungan Industrial, baik pekerja/buruh. Serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, organisasi pengusaha dan pemerintah, masing-masing melaksanakan peran dan fungsinya di dalam hubungan industrial demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024
Kota Cimahi

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2024	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
		3	4		5	6	7	8		9	10	11
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Profesionalitas ASN	50.00 nilai	73.40	- 50.00 nilai	50.00 nilai	81,92	163,84%	82	0	82	0,00%
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Perangkat daerah	86 nilai	88.58	- 86 nilai	86 nilai	89,12	103,63%	72	0	72	0,00%
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB nilai	BB	- BB nilai	BB nilai	BB	100%	52	0	52	0,00%
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	100 Persen	95 Persen	95 Persen	105,26%	111%	95	50	95	52,63%
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2	100,00%	2	1	2	50,00%
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	100,00%	1	0	1	0,00%
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	100,00%	1	0	1	0,00%
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	100,00%	1	0	1	0,00%
2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	100,00%	1	0	1	0,00%
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8	100,00%	8	5	8	62,50%
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100,00%	100	50	100	50,00%
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	27 Orang/Bulan	27 Orang/Bulan	23	85,19%	27	36	27	133,33%
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	100,00%	1	1	1	100,00%
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17	100,00%	17	8	17	47,06%

	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pengamanan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100,00%	100	50	100	50,00%
2.07.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3	100,00%	3	2	3	66,67%
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100%	100	50	100	50,00%
2.07.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47 Orang	43 Orang	47 Orang	47 Orang	43	91,49%	45	45	45	100,00%
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100,00%	100	50	100	50,00%
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2	100,00%	2	1	2	50,00%
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12	100,00%	12	6	12	50,00%
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13	100,00%	13	6	13	46,15%
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12	100,00%	12	6	12	50,00%
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12	100,00%	12	6	12	50,00%
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12	100,00%	12	6	12	50,00%
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100,00%	100	50	100	50,00%
2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7	100,00%	7	1	7	14,29%
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100,00%	100	50	100	50,00%
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12	100,00%	12	6	12	50,00%
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12	100,00%	12	6	12	50,00%
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100,00%	100	50	100	50,00%
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3	100,00%	3	2	3	66,67%
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1	100,00%	1	0	1	0,00%

2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	15 persen	44 persen	15 persen	15 persen	39,41	262,73%	20	26,65	20	133,25%
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Jenis Pelatihan yang dilaksanakan	4 Pelatihan	3 Pelatihan	4 Pelatihan	4 Pelatihan	20	500,00%	10	7	10	70,00%
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	300 Orang	825 Orang	300 Orang	300 Orang	1255	418,33%	739	398	739	53,86%
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	2	200,00%	2	1	2	50,00%
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	33 Lembaga	27 Lembaga	33 Lembaga	33 Lembaga	30	90,91%	33	27	33	81,82%
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1	100,00%	1	1	1	100,00%
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	100,00%	50	50	50	100,00%
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1	100,00%	1	1	1	100,00%
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	50 Perusahaan	50 Perusahaan	50 Perusahaan	50 Perusahaan	50	100,00%	1	1	1	100,00%
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	jumlah tenaga kerja siap pakai yang disalurkan dan ditempatkan	1000 orang	1765	1000 orang	1000 orang	3184	318,40%	1800	1497	1800	83,17%
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Nilai	88,58	86 Nilai	86 Nilai	89,12	103,63%	86	0	86	0,00%
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1.000 Orang	1765	1.000 Orang	1.000 Orang	2787	278,70%	1800	1163	1800	64,61%
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	100	100 Orang	100 Orang	500	500,00%	2400	2400	2400	100,00%
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	50 Orang	50	50 Orang	50 Orang	50	100,00%	100	100	100	100,00%
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	80 Orang	25	80 Orang	80 Orang	100	125,00%	440	512	440	116,36%
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Media Informasi Pasar Kerja yang dikelola	5 Media	5	5 Media	5 Media	5	100,00%	5	5	5	100,00%
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1	100,00%	1	1	1	100,00%
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem <i>Online</i> (Karir Hub)	1.700 Orang	2047	1.700 Orang	1.700 Orang	3184	187,29%	1700	1745	1700	102,65%
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pra dan Purna PMI yang di fasilitasi	40 Orang	40	40 Orang	40 Orang	#DIV/0!		40	31	40	77,50%
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/ PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	15 Orang	15	15 Orang	15 Orang		0,00%	40	31	40	77,50%

2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	35 persen	77,50%	35 persen	37 persen		0,00%	41	18,36	41	44,78%
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	42 Dokumen	50	42 Dokumen	43 Dokumen	43	0,00%	45	22	45	48,89%
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	38 Perusahaan	44	38 Perusahaan	38 Perusahaan	35	0,00%	38	20	38	52,63%
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	4 Perusahaan	6	4 Perusahaan	4 Perusahaan	8	0,00%	4	2	4	50,00%
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1	1 Laporan	1 Laporan	1	100,00%	1	0	1	0,00%
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang difasilitasi	45 Perkara	31	45 Perkara	42 Perkara		92,11%	35	21	35	60,00%
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2 Perkara	2	2 Perkara	2 Perkara	15	200,00%	2	11	2	550,00%
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	43 Perkara	31	43 Perkara	43 Perkara	23	100,00%	45	10	45	22,22%
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	7 Asosiasi	7	7 Asosiasi	7 Asosiasi	7	0,00%	7	6	7	85,71%
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1	1 Lembaga	1 Lembaga	1	750,00%	1	0	1	0,00%
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	prosentase koordinasi pelaksanaan penempatan transmigras	100	100				53,49%				
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	4	4				100,00%				
3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	450	n.a				100,00%				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	4	4				0,00%				
	Konsultasi dan Koordinasi mengenai pelaksanaan transmigrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						0,00%				

2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	90 persen	100	90 persen	90 persen	100	125,00%	90 persen	50	90 persen	55,56%
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTK	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1	163,84%	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0,00%
2.07.02.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	20 Perusahaan	20	20 Perusahaan	20 Perusahaan	20		20 Perusahaan	20	20 Perusahaan	100,00%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja adalah sesuai tabel berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	Persentase kasus yang diselesaikan			50 %	90 %	90 %	90 %	100%	100 %	90 %	90 %	
2	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki standar kompetensi			10 %	90 %	90 %	90 %	8,85%	100 %	90 %	90 %	
3	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan			5%	-	-	-	25,98%	-	-	-	
4	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan			50	78 %	79 %	80 %	89,52%	89,64 %	79 %	80 %	
5	Nilai evaluasi reformasi birokrasi Disnaker			-	60	60	60	-	81,43	60	60	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA

Gambaran rencana capaian dan realisasi sekarang merupakan hasil yang telah dicapai dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dirasakan masih ada program dan kegiatan yang bermasalah dan perlu ditingkatkan kinerjanya.

Masalah adalah kesenjangan antara keadaan sekarang dengan keadaan yang diinginkan, dalam setiap pelaksanaan kegiatan selalu diharapkan pada berbagai masalah yang pada akhirnya akan mengurangi bobot nilai yang ditetapkan dalam kegiatan. Masalah dapat dilihat dari aspek sebab akibat suatu resiko pelaksanaan program dan kegiatan yang disebabkan adanya keterbatasan sumber daya. Beberapa masalah utama yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Tupoksi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang berkembang, munculnya isu aktual dalam melakukan perumusan masalah hendaknya diketahui apa akar masalahnya dan kondisi awal yang menyebabkannya. Isu Strategis merupakan hal-hal utama yang dapat dilihat dari masing-masing strategis masalahnya, sehingga diperlukan analisa masalah yang selanjutnya memilih masalah pokok dan masalah spesifik dominan. Dinas Tenaga Kerjamempunyai peran yang sangat strategis didalam mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tingkat Kota dengan tingkat kewilayahan.

Peranan yang sangat strategis ini akan berjalan dengan baik apabila fungsi manajemen berjalan dengan baik.

Dinas Tenaga Kerja yang mempunyai tugas sebagai Pembina dan sebagai unsur dari perangkat daerah tentunya dituntut untuk melaksanakan system dan paradigma baru pemerintahan yaitu dapat mengoptimalisasikan fungsi manajemen.

Berdasarkan uraian di atas, Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi menetapkan kebijakan program Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Ketenaga Kerjaan melalui kegiatan Pengembangan sistem data dan jaringan informasi Ketenaga Kerjaan dan penempatan transmigrasi. Kebutuhan akan suatu sistem informasi dan basis data yang baku untuk memperoleh suatu pemahaman yang sama terhadap substansi permasalahan Ketenagakerjaan perlu mendapat prioritas, tentang isu dan permasalahan mendesak yang harus diselesaikan terutama permasalahan dan kebutuhan pembangunan berdasarkan hasil musrenbang tahunan daerah.

Berdasarkan pada rencana strategis atau tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, sasaran yang ingin dicapai dalam kurun 1 (satu) tahun adalah terwujudnya visi dan misi jangka menengah daerah.

Pembangunan dalam lima tahun kedepan akan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Adapun upaya peningkatan daya saing bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diarahkan untuk :

1. Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang layak (*decent work*) yaitu lapangan kerja produktif dengan perlindungan dan jaminan sosial yang memadai;
2. Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan;
3. Meningkatkan kondisi dan mekanisme hubungan Industrial untuk mendorong kesempatan kerja;
4. Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama) sesuai hukum internasional;
5. Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja;
6. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas;
7. Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah;

8. Menyempurnakan kebijakan migrasi;
9. Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui Informasi Pasar kerja.
10. Peningkatan Program Pelatihan untuk membuka peluang usaha.

Berdasarkan hasil capaian sasaran Pembangunan Sektor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kota Cimahi Tahun 2024, dalam upaya menurunkan angka pengangguran, mengoptimalkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan masih terdapat adanya permasalahan yang dihadapi. Beberapa Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Belum optimalnya sinergitas diantara stakeholder terkait yang dikenal dengan istilah 5 pilar ketenagakerjaan, yaitu Pemerintah (*Government*), Perusahaan (*Company*), akademisi (*Academy*), pelatih (*Trainer*) dan pencari kerja (*employee/job seeker*);
- b. Adanya ketidaksesuaian yang menyebabkan terjadinya kesenjangan yang terjadi antara jumlah lulusan dengan jumlah kebutuhan dunia kerja (dimensi kuantitas), kesenjangan kompetensi lulusan dengan kompetensi yang di butuhkan dunia kerja (dimensi kualitas), ketidak mampuan wilayah/daerah setempat menyerap lulusan (dimensi lokasi), dan perubahan kondisi ekonomi baik lokal, nasional, global dan lead time pendidikan (dimensi waktu).
- c. Ketidakpastian Ekonomi Lokal atau nasional, baik disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan perusahaan-perusahaan enggan merekrut lebih banyak pekerja
- d. Banyaknya industri di Kota Cimahi yang mulai beralih teknologi sebagai bagian dari implementasi industri 4.0 yang menuntut perusahaan/industri lebih banyak menggunakan tenaga robot dibanding tenaga manusia

- e. Penyesuaian kurikulum sekolah/SMK dengan kebutuhan perusahaan/industri sehingga akan melahirkan Sekolah Unggulan yang berpotensi menghasilkan para lulusan yang siap pakai serta menambah materi pelajaran yang bersifat soft skills
- f. Peminat Transmigrasi/Calon Transmigran reguler yang mendaftar sangat terbatas akibat kurangnya informasi dan pemahaman tentang transmigrasi;
- g. Kemampuan perusahaan dalam memberikan upah dan kesejahteraan kepada pekerja masih terbatas;
- h. Peran serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan masih belum optimal;
- i. Masih kurangnya pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban serta prosedur penyelesaian masalah dari sebagian pekerja masih rendah;
- j. Belum optimalnya Hubungan Industrial antara pekerja dengan pengusaha yang dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang memiliki PKB (Perjanjian Kerja Bersama);
- k. Belum Optimalnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja yang didaftarkan melalui program Jamsostek;
- l. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan ketenagakerjaan;

Sebagai upaya manajemen Dinas Tenaga Kerja dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan setiap tahunnya dirasakan perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang merupakan *break down* dari Renstra. Dinas Tenaga Kerja merupakan bagian tak terpisahkan dari Kota Cimahi. Dalam rangka mewujudkan Cimahi menjadi Kota Maju, Berbudaya dan Agamis yang mampu memanfaatkan segenap potensinya dengan melihat dan memperhatikan pencapaian tujuan dan sasaran Renja tahun yang lalu dalam rangkaian Renstra periode 2023 – 2026, Melihat potensi yang dimiliki baik secara geografis maupun demografis Dinas Tenaga Kerja diharapkan dapat melaksanakan percepatan pencapaian Visi Kota Cimahi yaitu Maju, Berbudaya dan Agamis, mengingat Kota Cimahi sesuai fungsi sebagai pusat jasa yang didukung oleh kegiatan perdagangan,

pendidikan dan IPTEK, Pariwisata, daerah industri, pesantren juga penduduknya memiliki tingkat pendidikan yang relatif diatas rata-rata sehingga potensi-potensi yang tepat dan kepercayaan yang diberikan terhadap pemerintah Kota dan Kecamatan dengan memberikan kesempatan untuk mengelola kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Untuk dapat terlaksananya program dan kegiatan sesuai kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan lapangan kerja dalam mencapai sasaran dan tujuan dengan penyusunan rencana tahunan, namun demikian titik tolak penyusunan rencananya tetap dengan memperhatikan realisasi pencapaian pada tahun anggaran sebelumnya dan perubahan kondisi Dinas yang diprediksi terjadi pada tahun berjalan.

Kota Cimahi yang merupakan salah satu Kota Jasa dan memiliki posisi strategis karena keberadaannya yang menjadi penghubung diantara 2 Kota Metropolitan yaitu Kota Bandung sebagai Ibukota provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara menjadi sebuah potensi yang jika dianalisis dengan menggunakan prinsip SWOT akan mampu mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi Pemerintah Kota sehingga diperoleh sebuah gambaran yang spesifik mengenai Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan yang dihadapi oleh Kota Cimahi dalam melakukan kegiatan Pembangunan Daerah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Sektor industri menjadi potensi yang menjadi primadona bagi masyarakat Kota Cimahi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk pendatang yang bekerja pada sektor industri. Kondisi ini tentunya mengakibatkan berbagai macam dampak, baik yang sifatnya positif dalam arti menguntungkan bagi penduduk itu sendiri maupun bagi Kota Cimahi secara umum, ataupun berdampak buruk atau negatif yang bisa menimbulkan ekses yang tidak diharapkan.

Adapun isu-isu strategi yang berpengaruh adalah sebagai berikut:

- Seiring dengan peningkatan Pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perbaikan aktivitas produksi di sektor industri pengolahan sangat berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran. Setelah mengalami penurunan TPT secara signifikan pada tahun 2022, TPT di Kota Cimahi kembali menurun pada tahun 2023. Meskipun masih menjadi salah satu kota dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Jawa Barat, namun menurut data BPS TPT Kota Cimahi Tahun 2023 tercatat menurun sebesar 0,25 poin menjadi 10,52%.

Arah kebijakan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi ditujukan terutama agar kegiatan yang akan dilaksanakan mempunyai dampak bagi peningkatan kemandirian masyarakat sehingga mereka mampu menolong dirinya sendiri serta mempunyai kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dilingkungannya sesuai dengan fungsi dan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam upaya merealisasikan kebijakan di atas perlu adanya suatu strategi untuk pencapaian visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Strategi dimaksud meliputi:

1. Peningkatan hubungan industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan
2. Penerapan Tata Kelola Kerja yang layak
3. Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi
4. Perluasan informasi kerja
5. Peningkatan Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja
6. Peningkatan kerjasama transmigrasi

Berdasarkan uraian di atas, dan sesuai dengan kewenangan Dinas Tenaga Kerja yang menjadi isu strategis sebagai implementasi program kota tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dalam menunjang

percepatan penanganan indikator sasaran program dan kegiatan yang belum optimal.

Maka Dinas Tenaga Kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya merumuskan program dan kegiatan yang berkenaan dengan isu dan masalah strategis sebagai berikut :

1. Program Hubungan Industrial
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2026

Tabel 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Provinsi Jawa Barat Kota Cimahi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Cimahi	- Indeks Profesionalitas ASN - Nilai IKM Perangkat daerah - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- 50.00 nilai - 86 nilai - BB nilai	6.550.503.167,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Cimahi	- Indeks Profesionalitas ASN - Nilai IKM Perangkat daerah - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- 50.00 nilai - 86 nilai - BB nilai	6.550.503.167,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Persentase Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	115.988.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Persentase Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	181.833.200,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.198.800,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	80.338.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.043.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.803.700,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.462.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.222.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.394.900,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.154.900,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.404.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.164.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	86.484.800,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	83.149.800,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.147.762.877,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.149.257.877,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	5.089.114.347,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/ bulan	5.089.114.347,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.628.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.388.400,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17 Laporan	53.020.130,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17 Laporan	54.755.130,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Persentase Terfasilitasinya Pengamanan Barang Milik Daerah	100 Persen	10.468.120,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Persentase Terfasilitasinya Pengamanan Barang Milik Daerah	100 Persen	10.468.120,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	10.468.120,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	10.468.120,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	128.777.200,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	119.297.200,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Cimahi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Cimahi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	128.777.200,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	119.297.200,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	333.128.230,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	378.770.770,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	55.980.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	56.704.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	58.201.200,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	89.286.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	36.167.030,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	55.000.770,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	24.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	24.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	35.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	118.780.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	118.780.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	Persentase Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	280.230.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	Persentase Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	280.230.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Cimahi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Cimahi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	280.230.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	280.230.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kota Cimahi	Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang	100 Persen	196.049.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kota Cimahi	Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang	100 Persen	196.049.000,00	

	Pemerintahan Daerah		Urusan Pemerintahan Daerah			Pemerintahan Daerah		Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.600.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.600.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	177.449.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	177.449.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi	Persentase Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	188.096.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi	Persentase Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	234.597.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	176.121.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	216.487.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11.975.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	18.110.000,00	
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGAKERJA	Kota Cimahi	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	90 persen	98.960.000,00	PROGRAM PERENCANAAN TENAGAKERJA	Kota Cimahi	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	90 persen	98.960.000,00	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen RTK	1 Dokumen	98.960.000,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen RTK	1 Dokumen	98.960.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Cimahi	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTKMikro	20 Orang	98.960.000,00	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Cimahi	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTKMikro	20 Orang	98.960.000,00	
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Cimahi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	15 persen	4.182.848.400,00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Cimahi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	15 persen	4.182.848.400,00	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Cimahi	Jumlah Jenis Pelatihan yang dilaksanakan	3 Pelatihan	6.353.642.057,00	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Cimahi	Jumlah Jenis Pelatihan yang dilaksanakan	3 Pelatihan	3.964.286.400,00	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Cimahi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	300 Orang	6.353.642.057,00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Cimahi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	739 Orang	3.964.286.400,00	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Cimahi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2 Kali	23.000.000,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Cimahi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2 Kali	131.439.000,00	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Cimahi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	33 Lembaga	23.000.000,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Cimahi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	33 Lembaga	131.439.000,00	
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Cimahi	Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan	1 Kali	50.750.000,00	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Cimahi	Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan	1 Kali	23.426.000,00	
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Cimahi	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	50.750.000,00	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Cimahi	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	23.426.000,00	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Kali	75.240.000,00	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Kali	63.697.000,00	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	75.240.000,00	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	63.697.000,00	

4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Cimahi	jumlah tenaga kerja siap pakai yang disalurkan dan ditempatkan	1800 orang	2.813.583.460,00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Cimahi	jumlah tenaga kerja siap pakai yang disalurkan dan ditempatkan	1800 orang	2.813.583.460,00	
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Nilai	269.463.300,00	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Nilai	1.879.703.460,00	
	Pelayanan antar Kerja	Kota Cimahi	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1300 Orang	145.468.200,00	Pelayanan antar Kerja	Kota Cimahi	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2400 Orang	174.856.460,00	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Cimahi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1300	39.576.700,00	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Cimahi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	2400 orang	146.203.000,00	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Cimahi	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	50 Orang	56.885.000,00	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Cimahi	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	100 Orang	24.572.000,00	
	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Cimahi	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	80 Orang	27.533.400,00	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Cimahi	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	440 Orang	1.534.072.000,00	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Cimahi	Jumlah Media Informasi Pasar Kerja yang dikelola	5 Media	321.969.400,00	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Cimahi	Jumlah Media Informasi Pasar Kerja yang dikelola	5 Media	253.263.000,00	
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Cimahi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	137.877.000,00	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Cimahi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	37.209.000,00	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Cimahi	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1700 Orang	184.092.400,00	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Cimahi	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1700 Orang	216.054.000,00	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Pra dan Purna PMI yang di fasilitasi	40 Orang	139.712.643,00	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Pra dan Purna PMI yang di fasilitasi	40 Orang	680.617.000,00	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Cimahi	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	15 Orang	139.712.643,00	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Cimahi	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	80 Orang	680.617.000,00	
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Cimahi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	35 persen	1.417.262.200	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Cimahi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	35 persen	1.417.262.200	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	45 Dokumen	606.385.400,00	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	45 Dokumen	561.889.400,00	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Cimahi	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	38 Perusahaan	25.077.000,00	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Cimahi	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	38 Perusahaan	24.707.000,00	
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Kota Cimahi	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	4 Perusahaan	25.077.000,00	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Kota Cimahi	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	4 Perusahaan	24.707.000,00	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan	Kota Cimahi	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar	1 Laporan	556.231.400,00	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga	Kota Cimahi	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar	1 Laporan	512.475.400,00	

	Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			Kerja serta Pengupahan		sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Kota Cimahi	Jumlah Perselisihan yang difasilitasi	35 Perkara	911.018.650,00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Cimahi	Jumlah Perselisihan yang difasilitasi	35 Perkara	955.514.650,00	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Cimahi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2 Perkara	437.413.450,00	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Cimahi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2 Perkara	467.133.450,00	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Cimahi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	45 Perkara	98.240.300,00	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Cimahi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	45 Perkara	102.234.100,00	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Cimahi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	7 Asosiasi dan Serikat Pekerja	211.653.200,00	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Cimahi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	7 Asosiasi dan Serikat Pekerja	210.343.000,00	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Cimahi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	163.711.700,00	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Cimahi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	175.804.100,00	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Cimahi	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0 Orang	0,00	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Cimahi	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0 Orang	0,00	
6	PROGRAM PEMBANGUNANKAWASAN TRANSMIGRASI	Kota Cimahi	prosentase koordinasi pelaksanaan transmigrasi	100%	0,00	PROGRA PEMBANG NAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kota Cimahi	prosentase koordinasi pelaksanaan transmigrasi	100%	87.342.000,00	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Cimahi	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	4 Kali	0,00	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Cimahi	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	4 Kali	87.342.000,00	
	Penyuluhan Transmigrasi	Kota Cimahi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	450 Kepala Keluarga	0,00	Penyuluhan Transmigrasi	Kota Cimahi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	450 Kepala Keluarga	87.342.000,00	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 tingkat Kelurahan dan Kecamatan, yang menjadi prioritas masyarakat Kota Cimahi bidang Ketenagakerjaan dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

PRIORITAS USULAN MASYARAKAT HASIL MUSRENBANG KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KECAMATAN CIMAHI UTARA

USULAN	ALAMAT LOKASI
Penyelenggaraan pendidikan non formal gratis	Citeureup
Pelatihan kewirausahaan	Citeureup
Peningkatan kesempatan kerja (JOB FAIR)	Citeureup
Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Cipageran
Peningkatan kesempatan kerja (JOB FAIR)	Cibabat
Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Cibabat
Pelatihan kewirausahaan (Otomotif)	Cipageran

KECAMATAN CIMAHI TENGAH

USULAN	ALAMAT LOKASI
Peningkatan kesempatan kerja (JOB FAIR)	Padasuka
Peningkatan kesempatan kerja (JOB FAIR)	Cigugur Tengah
Peningkatan kesempatan kerja (JOB FAIR)	Karangmekar
Pelatihan kewirausahaan	Baros
Peningkatan kesempatan kerja (JOB FAIR)	Baros

KECAMATAN CIMAHI SELATAN

USULAN	ALAMAT LOKASI
Penyelenggaraan pendidikan non formal gratis	Cibeureum
Peningkatan kesempatan kerja (JOB FAIR)	Cibeureum
Pelatihan kewirausahaan	Cibeureum
Pelatihan kewirausahaan	Leuwigajah
Peningkatan kesempatan kerja (JOB FAIR)	Utama
Pelatihan kewirausahaan	Utama
Peningkatan kesempatan kerja (JOB FAIR)	Utama
Pelatihan kewirausahaan	Cibeber
Peningkatan kesempatan kerja (JOB FAIR)	Utama
Peningkatan kesempatan kerja (JOB FAIR)	Cibeber
Pelatihan kewirausahaan	Cibeber
Pelatihan kewirausahaan	Melong

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan dalam lima tahun kedepan akan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Sedangkan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI pada pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenagakerjaan berusaha dan kesejahteraan transmigrasi yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan.

Adapun upaya peningkatan daya saing bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diarahkan untuk :

1. Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang layak (*decent work*) yaitu lapangan kerja produktif dengan perlindungan dan jaminan sosial yang memadai;
2. Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan;
3. Meningkatkan kondisi dan mekanisme hubungan Industrial untuk mendorong kesempatan kerja;
4. Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama) sesuai hukum internasional;
5. Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja;
6. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas;
7. Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah;
8. Menyempurnakan kebijakan migrasi;
9. Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui Informasi Pasar kerja.

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 termuat visi, misi, tujuan, strategi dan sasaran Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018 – 2023. Visi Provinsi Jawa Barat adalah "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi".

Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

Misi pertama,

membentuk manusia pancasila yang bertaqwa;
melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban, dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara;

Misi kedua,

melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;
dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millennial juara, perguruan tinggi juara, dan smk juara;

Misi ketiga,

mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara;

Misi keempat,

meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;
dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, umkm juara, dan wirausaha juara; serta

Misi kelima,

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.

Program Unggulan Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023 sebagai berikut:

1. Pertama, meningkatkan akses pendidikan untuk semua;
2. Kedua, desentralisasi pelayanan kesehatan;
3. Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi;
4. Keempat, mengembangkan destinasi dan infrastruktur pariwisata;
5. Kelima, mewujudkan pesantren juara;
6. Keenam, meningkatkan infrastruktur konektivitas wilayah;
7. Ketujuh, gerakan membangun desa;
8. Kedelapan, memberikan subsidi gratis untuk golongan ekonomi lemah; serta
9. Kesembilan, meningkatkan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Dari misi tersebut diatas dapat dilihat bahwa yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi ada di Misi keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;

dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, umkm juara, dan wirausaha juara; serta

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan cerminan dari kondisi yang diinginkan. Tujuan merupakan penjabaran Visi Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi dalam menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan

daerah. Kondisi tersebut diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan atau pada saat masa Renstra Perangkat Daerah ini berakhir.

Sedangkan sasaran adalah gambaran hal yang ingin diwujudkan guna mencapai tujuan telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Tenaga Kota Cimahi adalah :

Tujuan :

Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja

Sasaran :

Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja

Strategi dan arah kebijakan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pencapaian tujuan serta sasaran selama periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 disajikan dalam tabel berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	CIMAHI MANTAP		
MISI 2	PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN UMKM		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	- Peningkatan hubungan industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan - Penerapan Tata Kelola Kerja yang layak - Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi - Perluasan informasi kerja - Peningkatan Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja	Menurunkan angka perselisihan pengusaha dan pekerja Peningkatan jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama - Memberikan pelatihan dan sertifikasi - Menyediakan pusat informasi ketenagakerjaan - Membuka kesempatan pemagangan dan penempatan tenaga kerja
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah - Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.3.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Secara umum, pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan disesuaikan dengan dinamika pembangunan, kondisi daerah, serta arah kebijakan nasional dan daerah. Berikut faktor-faktor utama yang menjadi pertimbangan:

1. Mendukung Visi dan Misi serta Program Strategis Walikota dan Wakil Walikota
2. Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja sebelumnya;
3. Penyelarasan terhadap dokumen perencanaan lainnya;
4. Penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah;
5. Masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*);

3.3.2. Uraian Garis Besar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi pada 2026 antara lain:

Program :

1. Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan :

- 1) Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota

- Pelayanan antar Kerja

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja agar dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan minatnya, serta membantu pemberi kerja memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Layanan antar kerja merupakan mekanisme penting dalam sistem ketenagakerjaan aktif (*active labour market policy*).

- Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi, motivasi, dan arahan kepada pencari kerja mengenai dunia kerja, jenis-jenis jabatan, potensi diri, serta teknik untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Kegiatan ini juga mendukung peningkatan kesiapan kerja dan memperkecil kesenjangan antara pencari kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan (ULDK) merupakan wadah layanan yang menjembatani kebutuhan tenaga kerja disabilitas dengan dunia kerja, melalui kegiatan pendampingan, pelatihan, penyuluhan, konseling jabatan, hingga fasilitasi penempatan kerja yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.

- Perluasan Kesempatan Kerja

Sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja merupakan program strategis pemerintah dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja produktif melalui penciptaan dan pengembangan peluang kerja, baik di sektor formal maupun informal. Kegiatan ini dilakukan dengan mendorong kewirausahaan, membina tenaga kerja mandiri, memfasilitasi pengembangan padat karya, serta menjalin kemitraan dengan sektor swasta.

2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

- Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan fungsi dan efektivitas sistem aplikasi informasi pasar kerja berbasis online yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau pusat. Aplikasi ini digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara pencari kerja dan pemberi kerja secara real time, serta sebagai sarana pendataan dan pemantauan dinamika ketenagakerjaan. Pemeliharaan dan operasional yang optimal diperlukan untuk menjamin aplikasi tetap aman, responsif, dan relevan dengan kebutuhan pengguna.

- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan dan menyebarluaskan informasi pasar kerja secara daring (online) sebagai bagian dari pelayanan ketenagakerjaan kepada masyarakat. Informasi pasar kerja yang akurat, cepat, dan mudah diakses sangat penting untuk membantu pencari kerja memperoleh pekerjaan yang sesuai dan mendukung pemberi kerja dalam menemukan tenaga kerja yang dibutuhkan. Melalui media digital, pemerintah berperan sebagai fasilitator antara kedua pihak tersebut.

- Job Fair/Bursa Kerja

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan secara langsung antara pencari kerja dengan perusahaan pengguna tenaga kerja melalui forum terbuka yang bersifat massal dan terorganisir.

Pelaksanaan Job Fair menjadi sarana strategis untuk menyediakan informasi pasar kerja secara langsung dan menyeluruh, serta menjadi media interaktif antara pencari kerja dan perusahaan. Kegiatan ini juga menjadi upaya konkret pemerintah daerah dalam memberikan ruang akses kerja yang lebih luas, terutama bagi lulusan baru, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), dan masyarakat usia produktif lainnya yang sedang mencari pekerjaan.

3) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi serta memberikan pelindungan menyeluruh kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar mampu bekerja secara profesional, aman, dan bermartabat di luar negeri. Hal ini mencakup peningkatan keterampilan kerja, pemahaman hak-hak sebagai pekerja, serta penguatan pelindungan hukum dan sosial dalam proses penempatan dan kepulangan PMI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran.

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh CPMI mendapatkan akses informasi, edukasi, dan pelayanan administrasi secara terpadu sebelum berangkat ke negara tujuan penempatan.

Layanan terpadu yang disediakan mencakup aspek informasi pasar kerja luar negeri, bimbingan pra penempatan, fasilitasi dokumen administrasi, serta penguatan pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai pekerja migran.

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Kegiatan :

1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro bertujuan untuk menghasilkan dokumen perencanaan ketenagakerjaan di

tingkat kabupaten/kota atau wilayah lebih kecil (kecamatan/desa/kelurahan) yang memuat potensi, kebutuhan, dan proyeksi tenaga kerja secara lebih spesifik dan terukur. Rencana ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan, program pelatihan, penempatan kerja, dan pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta sebagai dasar untuk mendukung pembangunan ekonomi wilayah berbasis data ketenagakerjaan.

- Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan :

1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan kerja pencari kerja melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan berbasis klaster kompetensi, yaitu pelatihan yang disusun berdasarkan unit kompetensi spesifik dalam skema tertentu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan pelatihan ini, pencari kerja diharapkan memiliki kompetensi terstandar yang dapat diukur dan diakui secara nasional melalui sertifikasi kompetensi.

2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan relevansi pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) agar sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Pembinaan dilakukan melalui fasilitasi perizinan, asistensi teknis, pengawasan

kurikulum, peningkatan kapasitas instruktur, dan dukungan dalam proses akreditasi dan sertifikasi.

3) Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

- Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas kerja, dan daya saing perusahaan kecil melalui kegiatan konsultasi dan pendampingan produktivitas. Konsultasi diberikan kepada pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan dalam pengelolaan usaha, sistem kerja, atau pengembangan SDM agar dapat menerapkan prinsip-prinsip produktivitas, manajemen mutu, dan peningkatan kinerja berbasis metode yang terukur.

4) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan kompetensi teknis dan produktivitas kerja tenaga kerja di berbagai sektor, baik di perusahaan maupun usaha kecil/perorangan, sebagai dasar untuk peningkatan kualitas SDM dan perencanaan pelatihan yang lebih tepat sasaran. Pengukuran dilakukan secara sistematis melalui instrumen asesmen kompetensi, indikator produktivitas, dan observasi langsung, yang selaras dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta metodologi pengukuran produktivitas yang berlaku.

4. Program Hubungan Industrial

Kegiatan :

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan.

Peraturan Perusahaan (PP) merupakan peraturan yang dibuat secara sepihak oleh pengusaha dan mengatur syarat-syarat kerja, tata tertib perusahaan, serta hak dan kewajiban antara perusahaan dan pekerja.

- Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan.

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bagi Perusahaan merupakan proses resmi yang dilakukan oleh perusahaan dan serikat pekerja untuk mencatat kesepakatan yang telah disetujui bersama mengenai syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha. Di Indonesia, ketentuan mengenai PKB diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan turunannya.

- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja" merupakan bagian dari upaya pemerintah atau instansi terkait untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang tertib, transparan, dan adil, khususnya dalam hal hubungan industrial serta perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial.

2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah dan meminimalkan risiko terjadinya konflik antara pekerja dan pengusaha, mogok kerja, atau penutupan perusahaan yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi dalam satu daerah kabupaten/kota.

- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Jika perselisihan, mogok kerja, atau penutupan perusahaan berdampak pada satu daerah kabupaten/kota, maka mekanisme penyelesaian ditempuh secara bertahap mulai dari bipartit, mediasi, hingga ke PHI, dengan kewenangan utama berada di Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas hubungan industrial dan mencegah meluasnya konflik.

- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi.

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi bisa diartikan sebagai sebuah kegiatan atau proses administratif dan teknis yang dilakukan oleh instansi berwenang (biasanya Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Tenaga Kerja) untuk memastikan keabsahan dan jumlah anggota dari:

- a. Organisasi Pengusaha
 - b. Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
 - c. Organisasi non-afiliasi (yaitu organisasi yang tidak tergabung dalam federasi atau konfederasi mana pun)
- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah (LKST Daerah) Kabupaten/Kota merupakan bagian dari mekanisme dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh di tingkat

daerah. Lembaga ini berperan penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Berikut penjelasan rinci mengenai pelaksanaan operasional LKST Daerah Kabupaten/Kota.

- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

Strategi Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja meliputi :

- a. Sosialisasi dan Edukasi: Meningkatkan pemahaman pekerja dan pengusaha mengenai pentingnya jaminan sosial.
- b. Kolaborasi Pemerintah dan Swasta: Membangun kemitraan dalam pelaksanaan jaminan sosial dan penyediaan fasilitas kesejahteraan.
- c. Digitalisasi Sistem: Mempermudah pendaftaran, klaim, dan monitoring jaminan sosial.
- d. Perluasan Cakupan Peserta: Mengakomodasi pekerja informal dan sektor yang belum terjangkau.
- e. Peningkatan Kualitas Layanan: Memperbaiki pelayanan jaminan sosial agar cepat dan responsif.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah, terlaksananya penyusunan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dalam berbagai dokumen perencanaan

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
meliputi proses koordinasi internal dan eksternal serta penyusunan teknis dokumen RKA-SKPD sebagai acuan penganggaran tahunan. Kegiatan ini dilakukan sesuai siklus perencanaan daerah yang mengacu pada RKPD Kota Cimahi Tahun 2025 dan pagu indikatif yang telah ditetapkan.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Perubahan RKA-SKPD adalah revisi atau pembaruan dokumen RKA-SKPD yang biasanya dilakukan setelah dokumen awal disusun, sebagai respons terhadap perubahan kondisi, kebijakan, atau kebutuhan yang tidak terduga selama tahun anggaran berjalan.
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Pentingnya Koordinasi dalam Penyusunan DPA-SKPD meliputi:
 - a. Memastikan alokasi anggaran sesuai dengan program prioritas daerah.
 - b. Menghindari kesalahan dan duplikasi anggaran.
 - c. Mendukung transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
 - d. Menjamin efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Tujuan Perubahan DPA-SKPD
 - a. Menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan kondisi riil dan aktual.
 - b. Menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
 - c. Menyelaraskan dengan perubahan kebijakan atau prioritas daerah.

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan reviu dan monitoring terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tujuan Penyediaan Gaji dan Tunjangan adalah Menjamin kepastian dan kelancaran pembayaran hak keuangan ASN.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah Menyediakan informasi yang relevan dan andal tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas SKPD dan Menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

Laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan semesteran SKPD adalah laporan periodik yang menggambarkan pelaksanaan anggaran secara berkala dalam satu tahun anggaran. Laporan ini wajib disusun oleh SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban sementara terhadap pelaksanaan APBD.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan tercatat sebagai aset pemerintah daerah. Pengamanan BMD berarti segala upaya untuk menjaga keberadaan, nilai, dan fungsi aset daerah dari kerusakan, kehilangan, pengalihan, atau penyalahgunaan.

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah kegiatan pelatihan atau pembekalan teknis kepada aparatur pemerintah daerah (ASN) mengenai substansi dan penerapan dari regulasi terbaru (UU, PP, Permen, Permendagri, dsb) yang berlaku di bidang tugas tertentu.

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor adalah kegiatan pengadaan atau pemeliharaan alat-alat kerja dan kebutuhan operasional yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan SKPD.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan bahan logistik kantor adalah kegiatan pengadaan dan pemenuhan kebutuhan barang habis pakai dan bahan pendukung operasional kantor yang digunakan sehari-hari untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan barang cetak dan penggandaan adalah kegiatan pengadaan dan pengelolaan dokumen cetak serta bahan hasil reproduksi (penggandaan), baik dalam bentuk buku, formulir, laporan, brosur, maupun materi lainnya yang digunakan untuk keperluan kedinasan dan pelayanan publik.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan ini merupakan proses pengadaan, pengumpulan, dan penyediaan bahan bacaan berupa buku, jurnal, dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan, baik cetak maupun digital,

yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan kapasitas ASN di lingkungan SKPD.

- Fasilitasi Kunjungan Tamu

Fasilitasi kunjungan tamu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyambut, melayani, dan mendukung kelancaran kunjungan tamu resmi atau nonresmi ke kantor SKPD, baik tamu dari instansi pemerintah, mitra kerja, masyarakat, maupun pihak swasta.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi adalah kegiatan mengorganisir dan melaksanakan pertemuan resmi antar unit kerja dalam SKPD atau dengan pihak terkait, guna menyelaraskan program, kebijakan, dan pelaksanaan tugas serta menyelesaikan permasalahan.

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya adalah proses perencanaan, pengadaan, dan pemasangan atau pembangunan fasilitas fisik yang mendukung operasional kantor SKPD, seperti gedung kantor, ruang kerja, fasilitas pendukung, serta bangunan lain yang diperlukan untuk menunjang kinerja instansi.

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pengadaan kendaraan dinas jabatan ini merupakan bagian dari pemenuhan sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas operasional pimpinan perangkat daerah, khususnya dalam menjalankan fungsi

koordinasi, pengawasan, monitoring lapangan, serta kegiatan strategis lainnya yang memerlukan mobilitas tinggi. Selain itu, kendaraan dinas jabatan juga menjadi bagian dari standar kebutuhan minimum sarana kerja yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah.

- Pengadaan Aset Tak Berwujud

Pelaksanaan sub kegiatan ini sebagai bentuk penguatan sistem kerja berbasis teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik. Aset tak berwujud yang dimaksud dalam kegiatan ini merupakan aset non-fisik yang memiliki nilai ekonomi dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi, serta sebagai upaya mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengadaan aset tak berwujud ini juga menjadi bagian dari transformasi digital yang diarahkan pada efisiensi kerja, akurasi data, dan integrasi antar sistem layanan dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja.

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini mencakup pengadaan dan pembayaran jasa utilitas dasar seperti komunikasi (telepon, internet, fax), pasokan air bersih, serta listrik yang diperlukan untuk mendukung aktivitas kantor dan pelayanan publik di lingkungan SKPD.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor meliputi pengadaan dan pengelolaan layanan pendukung yang diperlukan untuk menunjang aktivitas sehari-hari di kantor, seperti kebersihan, keamanan, pemeliharaan gedung, dan jasa umum lainnya.

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan ini meliputi pengelolaan dan pengadaan jasa pemeliharaan rutin, biaya perawatan, pembayaran pajak kendaraan, serta pengurusan perizinan untuk kendaraan dinas yang digunakan dalam pelaksanaan tugas operasional atau kegiatan lapangan SKPD.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya adalah kegiatan perawatan, perbaikan, atau renovasi terhadap fasilitas fisik kantor yang bertujuan untuk menjaga kondisi bangunan agar tetap layak, aman, dan berfungsi optimal sesuai standar teknis dan kebutuhan operasional.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dinas Tenaga Kerja				17.942.245.531				17.942.245.531
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.942.245.531				17.942.245.531
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				17.942.245.531				17.942.245.531
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81,94 Nilai 89,32 Nilai BB Nilai	7.515.866.249			50.00 Nilai 86 Nilai BB Nilai	7.515.866.249
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		95 Persen	413.974.500			95 Persen	413.974.500
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	22.853.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	22.853.800
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	6.043.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	6.043.700
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	6.462.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	6.462.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.394.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3.394.900
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.404.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3.404.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	371.816.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Laporan	371.816.100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	5.860.577.549			100 Persen	5.860.577.549
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 Orang/bulan	5.805.750.049	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27 Orang/bula n	5.805.750.049

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.628.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	5.628.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Laporan	49.199.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Laporan	49.199.100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pengamanan Barang Milik Daerah		100 Persen	23.210.000			100 Persen	23.210.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	23.210.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	23.210.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	70.199.700			100 Persen	70.199.700
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47 Orang	70.199.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		47 Orang	70.199.700
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	386.104.822			100 Persen	386.104.822
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	135.013.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	135.013.200
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	45.682.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	45.682.800
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Paket	17.646.822	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Paket	17.646.822
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	24.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	24.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	6.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	157.762.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	157.762.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	470.305.000			100 Persen	470.305.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	167.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	167.400.000
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	20.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	282.905.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Unit	282.905.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	103.188.000			100 Persen	103.188.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	18.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	18.600.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	84.588.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	84.588.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	188.306.678			100 Persen	188.306.678
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	102.769.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	102.769.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	85.537.678	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	85.537.678
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		90 persen	154.786.000			90 persen	154.786.000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTK		1 Dokumen	154.786.000			1 Dokumen	154.786.000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	37.776.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	37.776.000
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	117.010.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang	117.010.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan		15 persen	3.640.430.962			15 persen	3.640.430.962
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Jenis Pelatihan yang dilaksanakan		3 Pelatihan	3.461.121.162			3 Pelatihan	3.461.121.162
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	3.461.121.162	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Orang	3.461.121.162
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		1 Kali	136.379.000			1 Kali	136.379.000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33 Lembaga	136.379.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33 Lembaga	136.379.000
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan		1 Kali	33.486.800			1 Kali	33.486.800
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Perusahaan	33.486.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Perusahaan	33.486.800
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		1 Kali	9.444.000			1 Kali	9.444.000
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	9.444.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	9.444.000

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	jumlah tenaga kerja siap pakai yang disalurkan dan ditempatkan		1000 orang	2.310.383.460			1000 orang	2.310.383.460
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		86 Nilai	1.856.269.460			86 Nilai	1.856.269.460
Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1000 Orang	164.490.460	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1000 Orang	164.490.460
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	146.203.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	146.203.000
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	24.572.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang	24.572.000
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Orang	1.521.004.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 Orang	1.521.004.000
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Media Informasi Pasar Kerja yang dikelola		5 Media	379.087.000			5 Media	379.087.000
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	67.021.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	67.021.000
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1700 Orang	122.066.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1700 Orang	122.066.000
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176 Orang	190.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		176 Orang	190.000.000
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pra dan Purna PMI yang di fasilitas		40 Orang	75.027.000			40 Orang	75.027.000
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Orang	25.027.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Orang	25.027.000
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang	50.000.000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak		41 persen	4.320.778.860			41 persen	4.320.778.860
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama		45 Dokumen	502.524.070			45 Dokumen	502.524.070
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38 Perusahaan	17.252.010	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		38 Perusahaan	17.252.010
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Perusahaan	17.252.010	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Perusahaan	17.252.010

Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	468.020.050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	468.020.050
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang difasilitasi		35 Perkara	3.818.254.790			35 Perkara	3.818.254.790
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Perkara	437.235.150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Perkara	437.235.150
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43 Perkara	103.698.850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		43 Perkara	103.698.850
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Asosiasi dan Serikat Pekerja	190.872.880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Asosiasi dan Serikat Pekerja	190.872.880
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	163.638.310	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Lembaga	163.638.310
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.506 Orang	2.922.809.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13.506 Orang	2.922.809.600

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2025 – 2029. Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Renstra Dinas Tenaga Kerja tahun 2025 – 2029.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai sasaran yang telah ditetapkan maka pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaan program dan kegiatan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Disamping itu dengan tetap memperhatikan peran dan fungsi serta tanggung jawab dari masing-masing pemegang program dan kegiatan, keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program, dalam satu unit maupun antar unitsangat diperlukan sehingga terjadi sinergitas pembangunan yang pada akhirnya bermuara pada percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2026 ini diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam menyusun dan merumuskan kegiatan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang Ketenagakerjaan di Kota Cimahi Tahun 2026.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 22 Agustus 2025

WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA